

Analisis Kemiskinan di Provinsi Aceh

Ika Hartika

Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

Ikahartika82@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a major problem that occurs in every country and region, including the province of Aceh. The success of a government can be seen from its ability to reduce poverty. Aceh, with its long history over the years, has received special attention from the centre, one of which is the OTSUS (Special Autonomy) fund. OTSUS (Special Autonomy) funds have been disbursed since 2008 and will end in 2027. These funds play a role in accelerating infrastructure development and overcoming social and economic gaps. However, it seems that the disbursement of OTSUS (Special Autonomy) funds does not have a significant impact on poverty alleviation. Based on data from the Ministry of Finance and APBA documents as a whole over a period of 15 years, Aceh province has received Special Autonomy Funds (DOKA) from the central government amounting to IDR 95.93 trillion. Then, according to the 2022 BPS survey, Aceh Province is the province with the highest percentage of poor people in Indonesia. Amounting to 15.33 percent in 2021 and 14.64 percent in 2022. Education, inflation and investment are important variables that must be considered in alleviating poverty in Aceh province. The higher the education level in an area, the lower the poverty rate. Poverty has an inverse relationship with education. The facts on the ground are that Aceh province has a low quality of education. This has become a big problem in recent years. Based on the results of the Computer-Based Written Examination (UTBK) for the 2020, 2021 and 2023 State University Entrance Joint Selection (SBMPTN), Aceh's score and the average student score is around 446.7, this point is still below the national average, in fact still under Papua Province. Then for the inflation variable, the inflation variable is a description of the ability of regional and central governments to maintain price stability. Inflation and poverty variables are directly proportional, the higher the inflation, the higher the poverty. Aceh is one of the provinces with the most expensive cost of living in Indonesia. This has a huge impact on the difficulty for people to fulfil their basic life needs. Then investment, investment drives the economy in a region, including the province of Aceh. Aceh has low foreign and regional investment, this has resulted in the wheels of the economy not turning and forcing the people of Aceh to supply their daily needs from outside.

Keywords: *Poverty, Education, Inflation and Investment*

ABSTRAK

Kemiskinan adalah permasalahan utama yang terjadi di setiap negara dan daerah termasuk provinsi Aceh. Keberhasilan sebuah pemerintahan dapat dilihat dari kecakapan dalam menurunkan angka kemiskinan. Aceh dengan sejarah panjangnya selama bertahun-tahun mendapat perhatian khusus dari pusat salah satunya berupa dana OTSUS (Otonomi Khusus). Dana OTSUS (Otonomi Khusus) sudah dikucurkan dari tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2027. Dana ini berperan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi kesenjangan sosial maupun perekonomian. Namun sepertinya kucuran dana OTSUS (Otonomi Khusus) ini tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan dokumen APBA secara keseluruhan selama kurun waktu 15 tahun, provinsi Aceh sudah menerima Dana Otonomi Khusus (DOKA) dari pemerintah pusat sebesar Rp 95,93 triliun rupiah. Kemudian menurut survey BPS tahun 2022 Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Sebesar 15,33 persen pada tahun 2021 dan 14,64 persen pada tahun 2022. Pendidikan, Inflasi dan Investasi adalah variabel-variabel penting yang harus diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan di provinsi Aceh. Semakin tinggi pendidikan pada suatu daerah maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Kemiskinan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan Pendidikan. Fakta dilapangan ditemukan bahwa provinsi Aceh memiliki mutu Pendidikan yang rendah. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar dalam beberapa tahun kebelakang. Berdasarkan Hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, 2021 dan tahun 2023, capaian skor Aceh dan nilai rata-rata siswa berkisar 446,7, poin tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional, bahkan masih berada dibawah Provinsi Papua. Kemudian untuk variabel inflasi, variabel inflasi adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kestabilan harga. Variabel Inflasi dan Kemiskinan berbanding lurus, semakin tinggi inflasi maka kemiskinan juga semakin tinggi. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Hal ini sangat berdampak pada sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian investasi, investasi menggerakkan perekonomian disuatu daerah termasuk provinsi Aceh. Aceh memiliki investasi asing dan daerah yang rendah hal ini mengakibatkan tidak berputarnya roda perekonomian dan memaksa masyarakat Aceh untuk memasok dari luar kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Inflasi dan Investasi

A. Pendahuluan

Saat ini seluruh negara di dunia berkompetisi untuk mendapat predikat sebagai negara maju. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap negaranya yang berimbas pada masuknya investasi-investasi dari luar. *Image* sebagai negara maju sangat menguntungkan pemerintah dan masyarakat dari segala lini. Fasilitas-fasilitas pelayanan

masyarakat yang canggih dan berteknologi tinggi dibangun diseluruh sektor, seperti jalan, jembatan, kereta api, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah dan banyak lagi. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan disuatu negara.

Demikian pula halnya dengan Indonesia, pemerintah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan disetiap daerah yang ada di Indonesia. Beragam fasilitas, program dan bantuan dikucurkan agar pembangunan merata dan dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak terkecuali dengan Aceh.

Aceh dengan sejarah panjangnya selama bertahun-tahun mendapat perhatian khusus dari pusat salah satunya berupa dana OTSUS (Otonomi Khusus). Dana OTSUS (Otonomi Khusus) sudah dikucurkan dari tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2027. Dana ini berperan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi kesenjangan sosial maupun perekonomian. Namun sepertinya kucuran dana OTSUS (Otonomi Khusus) ini tidak berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan dokumen APBA secara keseluruhan selama kurun waktu 15 tahun, provinsi Aceh sudah menerima Dana Otonomi Khusus (DOKA) dari pemerintah pusat sebesar Rp 95,93 triliun rupiah.

Kemudian menurut survey BPS tahun 2022 Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Sebesar 15,33 persen pada tahun 2021 dan 14,64 persen pada tahun 2022 (BPS, 2022). Perbandingan angka kemiskinan tiap daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2021	2022
ACEH	15.33	14.64
Simeulue	18.98	18.37
Aceh Singkil	20.36	19.18
Aceh Selatan	13.18	12.43
Aceh Tenggara	13.41	12.83
Aceh Timur	14.45	13.91
Aceh Tengah	15.26	14.50
Aceh Barat	18.81	17.93
Aceh Besar	14.05	13.38
Pidie	19.59	18.79
Bireuen	13.25	12.51
Aceh Utara	17.43	16.86
Aceh Barat Daya	16.34	15.44
Gayo Lues	19.64	18.87
Aceh Tamiang	13.34	12.61
Nagan Raya	18.23	17.38
Aceh Jaya	13.23	12.51
Bener Meriah	19.16	18.39
Pidie Jaya	19.55	18.45
Kota Banda Aceh	7.61	7.13
Kota Sabang	15.32	14.66
Kota Langsa	10.96	10.62
Kota Lhokseumawe	11.16	10.84
Kota Subulussalam	17.65	16.94

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Aceh Singkil adalah kabupaten dengan persentase angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 dan 2022. Padahal Kabupaten Aceh Singkil memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah. Aceh Singkil merupakan daerah yang kaya dengan potensi wisata. Sedangkan Kota Banda Aceh adalah daerah dengan persentase angka kemiskinan terendah di Provinsi Aceh. Hal ini wajar mengingat bahwa Kota Banda Aceh adalah ibukota provinsi Aceh. Aktivitas perekonomian dan pemerintahan berpusat disini menjadikan perputaran

ekonomi berkembang secara signifikan dan secara tidak langsung mengurangi angka kemiskinan. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan disuatu daerah termasuk provinsi Aceh. Dalam artikel ini penulis menganalisis kemiskinan dan variabel yang mempengaruhinya yaitu variabel pendidikan, inflasi dan investasi di Provinsi Aceh.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial (Lexy Moleong, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library research*). Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan bahan-bahan khusus lain. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat (Ariesto, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kemiskinan

a) Kemiskinan dalam Islam

Islam sangat peduli terhadap masalah kemiskinan ini, terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat ketika pada fase Makkah, di mana Islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat Islam terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Makkah. Mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan hak politik. Walaupun umat Islam dalam kondisi permulaan seperti

ini, Alquran telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya. Dalam fase ini, Allah SWT menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam Qur'an Surat al-Mudatsir ayat 38-46, Qur'an Surat al-Haqqah 25-29, Qur'an Surat adz-Dzariat 19-20, Qur'an Surat al-An'am 141, dan Qur'an Surat ar-Rum 38-39.

b) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan dimana dalam pandangan ini adalah orang miskin yang tinggal di dalam Kawasan kumuh dan pedesaan terisolir. Pendapat lain yang lebih luas adalah bahwa kemiskinan menyangkut faktor sosial, budaya dan lingkungan (Rahardjo, 2006).

Todaro mengatakan kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah- wilayah yang lingungannya buruk, dan memiliki penghasilan yang rendah. (Todaro, 2006) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (proverty line).

Penyebab Kemiskinan Sharp, et. al. dalam Kuncoro, 2011, mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapat yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dengan jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upah yang didapat juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung. Adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bersumber dari teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of proverty*). Teori ini mengatakan "*a poor country is poor because it is poor*" yang artinya negara miskin karena dia miskin. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya

pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan ini akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Maka dari itu, setiap tindakan untuk pengentasan kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Nurske, dalam Kuncoro 2006).

c) Penyebab Kemiskinan

Todaro menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri (Todaro, 2020).

Sedangkan menurut Jhingan, mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Ketiga, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

d) Jenis Kemiskinan

Faktor penyebab yang ada mengakibatkan berbagai jenis kemiskinan. Secara umum, terdapat 6 jenis kemiskinan.

1) Kemiskinan subjektif

Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Individu dengan persepsi seperti ini sebenarnya berkecukupan, hanya saja ia merasa tidak puas dengan pendapatannya.

2) Kemiskinan mutlak

Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

3) Kemiskinan relative

Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan, misalnya banyaknya pengangguran karena kurangnya pekerjaan.

4) Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat.

5) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern.

6) Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

2. Pendidikan

a) Pengertian pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku. Umumnya itu semua di dapatkan di lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Tiap individu akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhla mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan juga Negara (Dores, 2014).

Pendidikan merupakan salah satu bentuk konsumsi dari masyarakat. Menurut (Julianto, 2019) kebutuhan akan pendidikan terus meningkat seiring perkembangan zaman. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi pasar kerja yang mengalami pergeseran permintaan dari tenaga kerja tak terdidik menjadi tenaga kerja terdidik akibat proses industrialisasi. Dalam jangka panjang panjang hal ini ditanggapi oleh penduduk dengan melakukan investasi dibidang pendidikan dengan cara bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan sebuah instrument yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan manusia dan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang sosial dan pembangunan ekonomi. Pendidikan memungkinkan seorang individu untuk membuat aneka pilihan, meluaskan kedudukan dan juga peluang mereka untuk bicara dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan.

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.

2) Tingkat Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

3) Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

Kemiskinan memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karena pendidikan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui keterampilan dari diri sendiri, maka dari itu semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Elda Wahyu Azizah, Sudarti dan Hendra Kusuma yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dengan nilai probabilitasnya $0.0000 < \alpha = 0.10$ dan $t\text{-hitung} -15.35144 < t\text{-tabel } 2.02439$. (Azizah et al., 2018).

Fakta dilapangan ditemukan bahwa provinsi Aceh memiliki mutu Pendidikan yang rendah. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar dalam beberapa tahun kebelakang. Berdasarkan Hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, 2021 dan tahun 2023, capaian skor Aceh dan nilai rata-rata siswa berkisar 446,7, poin tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional, bahkan masih berada dibawah Provinsi Papua.

3. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;

- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

b. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- 1) Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Investasi juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah termasuk di Provinsi Aceh dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kemiskinan. Semakin banyak investasi-investasi yang terjadi disuatu daerah baik itu investasi pemerintah, dalam negeri maupun asing akan membangkitkan roda perekonomian, banyak lapangan kerja yang terserap, pengangguran menurun sehingga akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Samuelson mendefinisikan bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu

lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi (Samuelson, 2021).

b. Sebab Terjadinya Inflasi

1) Demand Pull Inflation

Demand pull inflation adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) pada sisi permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang yang tidak seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong harga naik sehingga terjadi inflasi. Dalam *demand pull inflation*, kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor produksi (misalnya tingkat upah). Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi sudah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Dalam keadaan hampir mendekati *full employment*, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga juga dapat menaikkan hasil produksi atau output. Akan tetapi, bila keadaan *full employment* telah tercapai, penambahan permintaan tidak akan menambah jumlah produksi melainkan hanya akan menaikkan harga saja sehingga sering disebut dengan inflasi murni.

2) Supply Side Inflation

Berbeda dengan *demand pull inflation*, *cost push inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) dari sisi penawaran barang dan jasa atau yang biasa juga disebut dengan *supply shock inflation*, biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang disertai oleh turunnya produksi atau output. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Perubahan ini digambarkan dari pergeseran kurva penawaran ke kiri, sehingga dengan *aggregate demand* yang tetap, maka keseimbangan pasar berubah (E0 ke E1)

dengan disertai peningkatan harga (P_0 ke P_1) dan tingkat output (Y) yang lebih rendah daripada tingkat *full employment*. Faktor lain yang menyebabkan perubahan *aggregate supply* antara lain dapat berupa terjadinya kenaikan tingkat upah (*wage cost-push inflation*), harga barang di dalam negeri dan harga barang impor atau karena kekakuan struktural.

3) Demand Supply Inflation

Peningkatan permintaan total (*aggregate demand*) menyebabkan kenaikan harga yang selanjutnya diikuti oleh penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sehingga menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Interaksi antara bertambahnya permintaan total dan berkurangnya penawaran total yang mendorong kenaikan harga ini merupakan akibat adanya ekspektasi bahwa tingkatharga dan tingkat upah akan meningkat atau dapat juga karena adanya inerti dari inflasi di masa lalu.

Inflasi juga merupakan variabel bebas yang sangat berperan dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan meningkat. Sebaliknya, jika inflasi menurun, maka angka kemiskinan akan berkurang. Hasil ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Edyson Susanto, Eny Rochaida dan Yana Ulfah yang berjudul “Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan, Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Inflasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Samarinda” (Susanto et al., 2018).

D. Penutup

Kemiskinan adalah permasalahan utama yang terjadi di setiap negara dan daerah termasuk provinsi Aceh. Keberhasilan sebuah pemerintahan dapat dilihat dari kecakapan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pendidikan, Inflasi dan Investasi adalah variabel-variabel penting yang harus diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan pada suatu daerah maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Kemiskinan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan Pendidikan. Kemudian untuk variabel inflasi, variabel inflasi adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kestabilan harga. Variabel

Inflasi dan Kemiskinan berbanding lurus, semakin tinggi inflasi maka kemiskinan juga semakin tinggi. Kemudian investasi, investasi menggerakkan perekonomian disuatu daerah termasuk provinsi Aceh. Aceh memiliki investasi asing dan daerah yang rendah hal ini mengakibatkan tidak berputarnya roda perekonomian dan memaksa masyarakat Aceh untuk memasok dari luar kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Y. (2012). Analisis Kemiskinan Dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.50-58>

Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.

Creswell, J. w. 2007. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. UK: SAGE Publication Inc.

Jhingan, M. L. 2002. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Maulana, A., & Suryaningrum, N. 2023. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 258–269. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.3.258-269>

Murjani, A. 2019. Short-Run and Long-Run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: Ardl Approach. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2 (1), 15. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29>

Mustika, C., Haryadi, H., Junaidi, J., & Zamzami, Z. (2022). The Relationship Between Absolute Poverty Income Inequality in Rural and Urban Areas in Indonesia: The Granger Causality Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 107–118. <https://doi.org/10.23960/jep.v11i2.541>

Rejekiingsih, T. W. (2012). Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2010. *Jurnal Dinamika Ekonomi*

Pembangunan, 1(1), 9. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.9-17>

Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>

Qadrunnanda, L. (2017). Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. Skripsi, 1–34.

Rachmadi, M. F. (2019). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 172–177.

Sugiarti, S. (2012). Pengaruh Antara Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia. <http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/2463>

Sukirno, Sadono. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.

Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2435>.

Tri Wahyuni, R. N., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 128–144. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.441>

Todaro P. Michael. 2020. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*, Jakarta Penerbit : Erlangga.

Todaro P. Michael., & Stephen, S. 2020. *Pembangunan Ekonomi Dunia Kesembilan*. Jakarta Penerbit : Erlangga.

Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 8, 176–185.

travel.kompas.com

www.ajnn.net

www.bps.go.id